

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH BAITUL MALL DI KOTA BANDA ACEH

¹Juhari, ²Teuku Zulyadi

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

juhari.basan@ar-raniry.ac.id, teukuzulyadi@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Fenomena kemiskinan tidak saja terjadi di daerah pedesaan, akan tetapi juga dialami oleh masyarakat perkotaan. Munculnya corona virus disease (covid-19) tampak semakin mendorong peningkatan angka kemiskinan khususnya masyarakat Kota Banda Aceh. Berbagai ragam geliat perekonomian masyarakat beranjak mundur seiring dengan lahirnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) oleh pemerintah. Meskipun kebijakan ini bertujuan memutuskan mata rantai peredaran Covid-19, namun telah berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh. Kemiskinan memang telah menjadi persoalan umum masyarakat dunia yang tidak mudah diselesaikan, tetapi tidak bermakna tidak bisa dicarikan solusi. Baitul Mal menjadi salah satu tumpuan harapan bagi penyelesaian persoalan kemiskinan terutama dalam menjawab kemana arah pemberdayaan masyarakat dan bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat Kota Banda Aceh..? Untuk memperoleh data terkait arah pembinaan masyarakat ini, maka penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview, appreciative inquiry, dan studi dokumen. Proses analisis data diperkuat dengan menghubungkannya dengan Teori Intervensi. Teori ini dipandang cukup relevan karena baitul Mal Kota Banda Aceh juga melakukan sejumlah intervensi dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa baitul mal telah melakukan beberapa intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dalam berbentuk kolaboratif dan uswah fardiyah sehingga telah mendorong percepatan kemandirian masyarakat miskin.

Kata Kunci : Bentuk Pemberdayaan; Masyarakat Miskin, Baitul Mal Banda Aceh.

Abstact

The phenomenon of poverty does not only occur in rural areas, but is also in urban communities. The case of corona virus disease (covid-19) seems to increasingly encourage an increase in poverty rates, especially for the people of Banda Aceh. Various kinds of economic activity in the community are moving backwards in line with the birth of the policy of implementing restrictions on community activities (PKM) by the government. Although this policy aims to break the chain of Covid-19 circulation, it has had a significant impact on the economic growth of the people in Banda Aceh. Now, the problem of Poverty become a common problem in the world that is not easily solved, but that does not mean that it cannot be solved. Baitul Mal is one of the pillars of hope for solving the problems, especially in answering where is the direction of community empowerment and what is the form of community empowerment in Banda Aceh ? To obtain data related to the direction of this community development, this research was conducted qualitatively. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews, appreciative inquiry, and document studies. The data analysis process is strengthened by linking it with the Intervention Theory. This theory is considered quite relevant because the Baitul Mal of Banda Aceh has also carried out a number of interventions in order to empower the people's economy. The results of the study illustrate that Baitul Mal has carried out several interventions in the context of empowering the poor in the form of collaborative and uswah fardiyah so that it has encouraged the acceleration of the independence of the poor.

Key Words : Form of empowerment - Poor People and Baitul Mal Banda Aceh.

A. Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan khususnya di perkotaan selalu menjadi terma menarik untuk dikaji terutama oleh para pemerhati masalah-masalah sosial. Secara umum, perkotaan merupakan sebuah kawasan yang sering diidentikkan dengan masyarakat elite dan kaum berada. Namun fakta menunjukkan bahwa di perkotaan juga ditemukan adanya orang-orang yang kurang mampu (miskin) yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS) tahun 2020 Kota Banda Aceh menempati posisi angka kemiskinan terendah di Aceh, yaitu 6,90 %.¹ Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Banda Aceh yang mencapai 265,111, maka jumlah penduduk miskin berjumlah 293 jiwa. Data ini juga memperlihatkan adanya penurunan angka kemiskinan dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 0,32 %.² Meskipun angka kemiskinan di Kota Banda Aceh berada pada posisi terendah di Aceh, namun keberadaan mereka memerlukan sentuhan semua pihak agar menjadi lebih mandiri. Perhatian dan keinginan untuk memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu ini tidak saja dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropis, akan tetapi juga muncul di kalangan akademisi. Berbagai penelitian terus dilakukan dalam rangka memberikan perhatian bagi masyarakat miskin di satu sisi, dan upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis di sisi lain.

Pada dasarnya, upaya memberdayakan masyarakat miskin tidak saja melibatkan kerja akademik yang bersifat abstrak, akan tetapi memerlukan adanya upaya nyata sehingga manfaatnya bisa langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan adanya kerjasama antara kaum akademik dengan pelaku pemberdayaan seperti yang dipraktikkan oleh lembaga-lembaga charitis. Kerjama ini diyakini akan melahirkan konsep-konsep, strategi dan bahkan teori baru yang sangat berguna bagi para pemerhati masalah sosial dalam menekan angka kemiskinan dan melakukan proses pemberdayaan masyarakat.

Penyelesaian masalah kemiskinan bukanlah pekerjaan mudah, akan tetapi memerlukan keseriusan, konsentrasi dan strategi tertentu sehingga memberikan kemudahan-kemudahan dalam merealisasikannya. Menurut Debrina, terdapat beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat, antara lain melindungi keluarga-keluarga miskin dengan menjaga dan memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan pangan, papan dan sandang. Selain itu, para keluarga miskin juga perlu diberikan pelatihan ketrampilan (*Skill*) secara periodik dan bersahaja sehingga memiliki

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2019- 2020.

² Demografi Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2020.

kesanggupan untuk memenuhi hajat hidup utamanya sehingga mampu hidup mandiri dengan berbagai bentuk usaha ekonomi produktif. Menurutnya, penguatan kemandirian melalui usaha entrepreneurship ini dipandang sebagai salah satu upaya yang cukup efektif dalam meminimalisir lahirnya kemiskinan baru.³

Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Salah satu di antaranya adalah lembaga Zakat, Infak dan Shadakah. Menurut Irfan Beik, Lembaga ini dinilai cukup bersahaja dan komit mensosialisasikan zakat produktif ke berbagai elemen masyarakat sehingga mampu memberikan semangat hidup bagi orang-orang miskin untuk memperbaiki nasibnya. Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud untuk menekan angka kemiskinan dalam masyarakat, baik baik di kota maupun desa-desa. Ia menambahkan bahwa program *dompet dhu'afa* misalnya telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat penerima hingga mencapai 10 persen, berbanding dengan keadaan ekonomi sebelum mendapatkan bantuan zakat.⁴

Upaya pengentasan kemiskinan tidak selamanya berjalan mulus, akan tetapi juga mengalami dinamika tersendiri. Munculnya issue covid-19 pada tahun 2019 lalu telah ikut mempersulit kondisi ekonomi semua elemen masyarakat, seumpama elemen pendidikan, layanan publik, kesehatan dan perekonomian. Sejumlah sektor dunia usaha terpaksa berhenti bergerak karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan sebaran covid yang tersebar dengan sangat cepat. Dalam perspektif ekonomi, corona ini juga telah berdampak negatif terhadap dalam semua bentuk perekonomian masyarakat, bahkan secara makro negarapun mengalami kesulitan tersendiri dalam mempertahankan daya beli. Hal ini ditandai dengan melemahnya kurs rupiah bila dibandingkan dengan mata uang negara lainnya.⁵

Kehadiran Baitul Mal melalui penguatan zakat produktifnya tentu sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Namun tidak semua baitul mal yang ada di Aceh mampu berkiprah dengan baik dan profesional dalam pengelolaan zakat produktif ini sehingga mampu memberikan intervensi-intervensi kongkrit bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan salah satu baitul mal yang keberadaannya cukup strategis karena berada di pusat kota Provinsi. Posisinya

³ Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6.

⁴ Irfan Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika," *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009): 45–53.

⁵ Rahmat Arfan et al., "Peran Ukm Dalam Menstabilkan Harga Masker Sebagai Bentuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Banda Aceh," *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi Dan Aplikasi)* 1, no. 1 (2020): 31, <https://doi.org/10.12928/spekta.v1i1.2694>.

yang strategis ini bisa memposisikan baitul mal Kota Banda Aceh menjadi pusat perhatian dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, terutama data yang terkait dengan bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Karena itu pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memberdayakan Masyarakat miskin di Kota Banda Aceh ?

B. Konsep Pemberdayaan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, kata berdaya memiliki makna berkekuatan, berkemampuan atau bertenaga dalam menghadapi sesuatu⁶ Edi Suharto menjelaskan, secara konseptual, istilah pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep ini dapat dipahami dalam dua sisi, yaitu pemberdayaan sebagai suatu proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan dimaknai dengan seperangkat kegiatan untuk memberdayakan kelompok lemah, baik secara individu atau kelompok. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan dimaksudkan dengan capaian hasil yang diperoleh dari sebuah proses berupa kemandirian atau keberdayaan masyarakat.⁷ Penjelasan ini memberikan pemahaman bahwa pemberdayaan merupakan upaya menggerakkan orang lain agar memiliki kemampuan dalam menjawab persoalan yang dihadapinya.

Kelompok atau individu yang dijadikan sasaran pemberdayaan terdiri dari orang-orang yang tidak berdaya atau miskin. Sasaran pemberdayaan dalam standar minimal adalah mampu merubah keadaan seseorang dari hidup yang serba kekurangan menuju ketercukupan ekonomi. Orang-orang yang terlibat dalam proses pemberdayaan biasanya terdiri dari orang-orang berada dan dermawan. Kedua kriteria ini menjadi landasan utama terlaksananya proses pemberdayaan terhadap masyarakat miskin, sebab ketika terdapat banyak orang berada namun tidak memiliki rasa empati terhadap kelompok orang-orang tak berdaya, maka proses pemberdayaan tidak akan terlaksana. Kedua kriteria ini pula yang telah mendorong lahirnya berbagai lembaga *charity* atau lembaga filantropi di berbagai negara.

Perhatian para dermawan terhadap kaum dhu'afa di berbagai negara melalui berbagai lembaga *charity* telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kaum lemah. Hal membuktikan bahwa keberadaan orang-orang kaya dermawan di satu sisi dan orang-orang yang tak berkecukupan di sisi lain merupakan fakta yang tak terbantahkan di seuruh dunia. Fakta inilah yang telah menggelitik kita untuk memahami kondisi sosial dalam posisi dan kapasitas yang berbeda. Karena itu dapat

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 241.

⁷ Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 57.

dipahami bahwa kemiskinan dan kemapanan merupakan dua relitas ganda (*double reality*) yang selalu terjadi dalam kehidupan sosial di sepanjang sejarah manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa secara etimologis kata miskin dimaknai dengan serba kekurangan atau berpenghasilan rendah.⁸ Penambahan awalan dan akhiran pada kata “miskin” menjadi “ke-miskin-an” menggambarkan suatu keadaan atau ketidakmampuan yang dialami seseorang tertentu. Secara terminologis, Soerjono Soekanto memaknai kemiskinan dengan ketidaksanggupan seseorang dalam beradaptasi dengan tatanan sosial yang ada baik secara fisik maupun psikologis.⁹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menjabarkan arti kemiskinan itu dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu kemiskinan material dan kemiskinan sosial. Kemiskinan dalam katgeri pertama dimaknai dengan rendahnya tingkat pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan dalam dimensi kedua (kemiskinan psikologis) dipahami sebagai ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial sehingga termarginalkan dari kelompok sosialnya.¹⁰

Dalam perspektif sejarah, kemiskinan merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia yang tidak terbantahkan, sehingga terkesan bahwa kemiskinan telah menjadi persoalan dan bahkan momok yang tidak menyenangkan dari masa ke masa. Fenomena ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat bahwa kemiskinan itu tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan sosial. Meskipun persoalan kemiskinan itu telah menjadi bagian dari persoalan manusia secara menyeluruh (*camon problems*), namun tidak selalu bermakna bahwa kemiskinan itu tidak bisa dicarikan solusi.

Dalam ajaran Islam dijumpai sebuah wejangan Nabi yang mengatakan, semua penyakit pasti ada obatnya, kecuali mati. Bila wejangan ini dihubungkan dengan kemiskinan, maka dapat dipahami bahwa setiap kemiskinan pasti ada solusinya. Persoalannya sekarang seberapa optimis kita dalam mencari solusi atas persoalan kemiskinan itu. Bila dikaitkan dengan teori perubahan sosial, dikatakan bahwa segala sesuatu bertotensi untuk berubah dan ia bersifat dinamis.¹¹ Karena itu perubahan itu bisa saja mengarah pada kebaikan atau sebaliknya. Bila merujuk pada teori Pusaran

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 749.

⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru keempat, Rajawali press, Jakarta, hlm.406.

¹⁰ Elly M Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecabannya*, Kencana, Jakarta, hlm.792.

¹¹ Elly M.Setiadi...hlm.609.

(salah satu dari teori Perubahan Sosial) dikatakan bahwa perubahan itu menuju dua arah yang berbeda, yaitu perubahan dari baik ke buruk dan dari buruk ke baik.¹²

Dalam kaitannya dengan persoalan kemiskinan di atas, dapat dipahami bahwa setiap individu atau kelompok memiliki potensi yang sama untuk berubah. Fakta sejarah juga mengungkapkan adanya orang-orang kaya yang jatuh miskin, seumpama kisah Nabi Luth as yang awalnya merupakan orang kaya, namun diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan penyakit. Begitu juga dengan kisah Sa'labah seorang sahabat Rasulullah yang miskin berupah menjadi kaya. Fakta ini menginspirasi bahwa kemiskinan itu dapat dirubah. Perubahan minimal dapat diupayakan dengan cara memberdayakan mereka sehingga berubah menjadi individu yang lebih berkemampuan. Upaya merubah keadaan ekonomi masyarakat miskin menuju pemberdayaan tentu memiliki pendekatan yang berbeda antara masyarakat kota dan di desa. Kemampuan dan tingkat profesionalisme masyarakat desa serta aset-aset yang mendukung penyelesaian kasus kemiskinan desa jauh lebih rendah berbanding keadaan dalam masyarakat kota.

Issue tentang kemiskinan selalu saja menjadi tema menarik diperbincangkan baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Orientasi perbincanganpun sering diarahkan untuk menemukan solusi dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin dengan berbagai pendekatan dan strategi. Edi Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai potensi yang dimilikinya menuju kehidupan yang mandiri secara efektif dan partisipatif.¹³ Terkait dengan sasaran ini, Mayo mencoba merumuskan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai seperangkat aktivitas bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kemandirian.¹⁴

Ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk membangun keberdayaan masyarakat miskin. Dalam perspektif Islam, zakat dipandang sebagai salah satu sumber potensial yang dapat dijadikan sebagai *alternative solution* untuk menjawab masalah kemiskinan dalam masyarakat. Kata zakat secara etimologis bermakna bersih, suci, subur dan berkembang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa zakat merupakan harta dengan kadar tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam dan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.¹⁵

¹² Juhari Hasan, 2014, *Standar Kompetensi Da'i Profesional Dalam Konteks Dinamika Perubahan Sosial*, Hasil penelitian Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, hlm.42.

¹³ Edi Suharto, 2006, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Reika Aditama, Bandung, hlm. 37.

¹⁴ Mayo, M. 1998, *Social Work : Theme, Issues and Critical Debates*, Mac. Millan, London, hlm.162

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1279.

Dalam pandangan para fuqaha, zakat merupakan perintah wajib atas umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk disalurkan kepada orang fakir, miskin, dan lain-lain sesuai ketentuan syar'i. Pada dasarnya zakat itu tidak hanya memberikan hartanya kepada orang lain, namun dibalik semua itu zakat memiliki nuansa spiritual tersendiri bagi para *muzakki*. Secara psikologis muzakki akan merasa hadirnya ketenangan jiwa yang tidak bisa diukur secara metamatis. Karena itu Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, menjelaskan bahwa selain dapat mensucikan harta zakat juga mampu membersihkan jiwa para *muzakki* dari berbagai dosa selain syirik serta mampu menyuburkan harta itu sendiri.¹⁶

T.M.Hasbi as-Shiddieqy menjelaskan zakat dalam beberapa istilah bahasa seperti *nama'* (subur), *thabarab* (suci), *Barakah* (keberkahan) dan *tazkiya* yang berarti mensucikan. Istilah tersebut mengandung makna bahwa zakat adalah mensucikan dan menyuburkan harta. Ia juga memberikan pemahaman bahwa zakat dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu *sebagai* ladang kesuburan dan *kedua*, zakat menjadi perantara proses pensucian harta dan jiwa dari sifat kufur.¹⁷

Kedua ulama di atas memiliki keseragaman pandangan dalam memahami zakat, yaitu mengandung makna bahwa zakat yang dikeluarkan itu mengandung unsur kesuburan dan berkembang, terutama bagi muzakki dan mustahik. Karena itu potensi zakat ini bila dikelola dengan baik dan profesional, maka menjadi solusi alternatif atas persoalan ekonomi keummatan. Potensi zakat dan seluruh aset yang ada diyakini mampu mengeluarkan masyarakat dari keterpurukan ekonomi. Hal ini telah menjadi fakta sejarah yang dilukiskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia telah diakui sebagai pelopor pembebasan masyarakat miskin menuju kemandirian di sepanjang sejarah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban bersama yang mesti dilakukan oleh umat Islam dengan melibatkan semua stakeholder yang ada menuju kemandirian masyarakat miskin. Stakeholder tersebut dapat terdiri dari penguasa, pengusaha, ilmuan, politisi, ekonom dan unsur sosial lainnya dalam rangka menjawab persoalan kemiskinan yang ada. Menggerakkan potensi dapat dimaknai dengan upaya menggali berbagai sumber dan potensi yang ada dalam rangka membangun masyarakat mandiri. Karena itu konsep pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa setiap masyarakat diyakini memiliki berbagai potensi yang bisa digerakkan menuju terciptanya masyarakat yang mandiri. Salah satu sumber ekonomi potensial dalam memberdayakan masyarakat miskin adalah zakat dengan segala sumber dan asetnya.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid-3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Darul Fikri dan Gema Insani, Jakarta, hlm. 164.

¹⁷ T.M.Hasbi As-Shiddieqy, 1991, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.24.

C. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial dijumpai sejumlah konsep tentang pemberdayaan masyarakat, namun intinya adalah seperangkat usaha untuk merubah kondisi tertentu agar lebih baik dari kondisi sebelumnya. Paling tidak dijumpai ada 4 (empat) prinsip yang dianut dalam proses pemberdayaan. *Pertama* prinsip kebersahajaan, yaitu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan dan dilakukan melalui proses perencanaan yang baik. *Kedua*, Sistemik, yaitu dilakukan secara profesional, terstruktur dan terukur sesuai dengan norma-norma yang berlaku serta dapat beradaptasi dengan berbagai kearifan yang ada. *Ketiga*, holistik, yaitu menganut prinsip menyeluruh. Prinsip ini banyak melibatkan berbagai pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam proses pemberdayaan. *Keempat*, prinsip regeneratif, yaitu menganut prinsip kontinuitas dan berkesinambungan atau terus menerus hingga terciptanya kemandirian masyarakat miskin, terutama di bidang ekonomi.

Dalam menjalankan keempat prinsip di atas maka diperlukan keseriusan semua *stakeholder* terutama dalam menemukan bentuk atau model pemberdayaan menuju kemandirian masyarakat. Untuk menemukan bentuk pemberdayaan, maka ada baiknya dipaparkan beberapa pandangan para ahli terkait dengan bentuk atau model tersebut. Jack Rothman (dalam Edi Suharto), menjelaskan beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat antara lain, *pertama*, pengembangan lokal. Bentuk ini lebih mengedepankan proses menggerakkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat sebagai model penyelesaian persoalan ketidakberdayaan masyarakat. Model ini memposisikan pekerja dan elemen sosial lainnya sebagai dinamisor atau pembangkit semangat dalam menggerakkan potensi yang masih terpendam.

Kedua, Jack juga menawarkan bentuk perencanaan Sosial (*Social Planning Model*). Model ini menempatkan audien sebagai pihak yang dilayani dengan baik. Posisi mereka sebagai pihak yang dilayani dikarenakan ketidakmampuannya dalam menghadapi persoalan hidup mereka. Sedangkan seluruh para pekerja sosial diposisikan sebagai dinamisor yang bersifat profesional. Para penggerak ini terdiri dari mereka yang memiliki ketrampilan terlatih dalam merencanakan aksi pemberdayaan terhadap masyarakat kelompok sasaran yang terdiri dari orang miskin renta, penyandang cacat, dan lain-lain.

Ketiga, bentuk *Social Action* yaitu sebuah model yang meyakini bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada berbagai potensi yang belum digerakkan sehingga tidak bersifat fungsional bagi proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Asumsi yang dibangun dalam model ini adalah adanya keterlibatan struktural dalam proses kemiskinan masyarakat. Artinya, masyarakat itu sengaja dimiskinkan agar tidak berdaya. Kebijakan-kebijakan yang dicetuskan sering tidak bersifat populis, atau tidak berpihak kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan adanya aksi nyata baik dari

stakeholder maupun masyarakat itu sendiri untuk bergerak mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang dicita-citakan.¹⁸

Ketiga bentuk yang diajukan Jack Rothman ini menjadi panduan dalam memformulasikan bentuk baru pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Banda Aceh. Penemuan bentuk pemberdayaan baru dilakukan melalui pendekatan sosio religous dan sosio kultural sehingga proses upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan baik.

D. Teori Intervensi Sosial

Teori intervensi sosial ini awalnya diperkenalkan oleh Loewenberg. Selanjutnya terus mengalami perkembangan yang cukup berarti sehingga banyak dijadikan pijakan oleh para pemerhati masalah kesejahteraan sosial terutama dalam kaitannya dengan kajian-kajian strategis terkait proses pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Teori ini juga ikut menyumbang beberapa strategi dan pendekatan sehingga tindakan yang dilakukan para pekerja sosial itu memiliki efek positif bagi proses pemberdayaan itu sendiri. Inilah yang melatarbelakangi penggunaan teori ini dalam upaya menemukan model pemberdayaan masyarakat miskin pada Baitul mal Kota Banda Aceh.

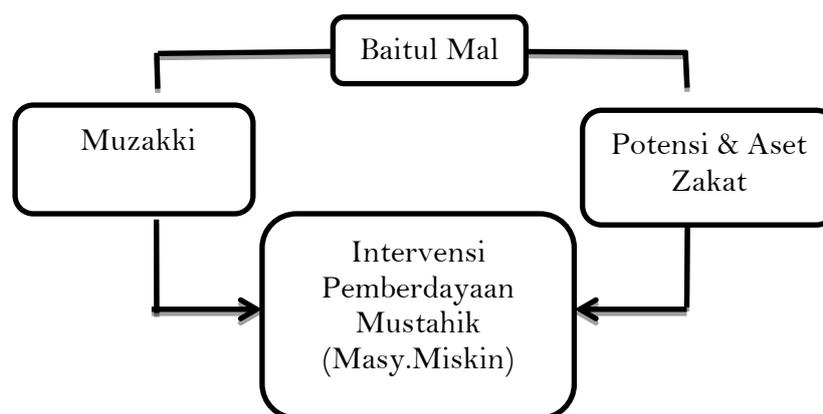
Teori ini juga menjelaskan bahwa intervensi sosial merupakan agenda atau strategi dalam memberikan bantuan kepada orang lain, baik bersifat individu maupun kelompok. Menurutnya, tindakan yang bersifat intervensi ini tidak saja diarahkan kepada *client* yang membutuhkan bantuan, akan tetapi juga kepada komunitas lain yang ada di sekitarnya sehingga menimbulkan semangat kebersamaan.¹⁹

Strategi mengedepankan intervensi langsung baik kepada *client* yang mengalami masalah kemiskinan maupun kepada komunitas sosial di lingkungannya yang dipandang sebagai sasaran perantara yang sangat mebentu penyelesaian masalah kemiskinan menjadi ciri khas dari teori ini. Intervensi langsung kepada masyarakat miskin terkandung menjadi tidak efektif manakala tidak diiringi oleh adanya dukungan dan keikutsertaan masyarakat di sekitar *client* itu berada. Karena itu, intervensi dalam bentuk kolektif koligial yang diajukan dalam teori ini dipandang cukup strategis bagi upayapenguatan masyarakat menuju kemandirian.

¹⁸ Edi Suharto, 2006, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

¹⁹ Loewenberg, Frank.M, 1972, *Social Work, Social Welfare and Social intervention*. In Loewenberg, Frank.M, Ralph Dolgoff, *The Practice of Social Interventions : Goals, Roles and Strategies*, Itaca, FE. Peacock Publisher Inc, hlm. 3-12.

Dalam pandangan teori ini, masyarakat miskin yang berposisi sebagai *mustahik zakat* merupakan *clien* yang perlu diberi bantuan oleh orang lain. Sedangkan para *muzakki* yang berada di sekitarnya merupakan kumpulan aktor yang memiliki kemampuan investasi dalam memberdayakan *clien*. Sedangkan Baitu Mal merupakan penggerak, motivator dan mediator yang akan menggerakkan semua potensi baik dalam bentuk zakat, infak dan shadakah yang diperuntukkan bagi pemberdayaan para *mustahik*. Mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang beralamat di jalan Malem Dagang nomor 40, Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dan di Baitul Mal Gampong Beurawe sebagai perwakilan Baitul Mal Gampong yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Pemilihan Baitul mal Gampong Beurawe ini didasarkan pada sejumlah informasi tentang kiprah Baitul mal gampong Beurawe selama ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik *Asset Based Community Development* (ABCD). Di dalam teknik ABCD terdapat metode dan alat untuk memobilisasi dan menemukan aset yang bisa diberdaya untuk penguatan masyarakat miskin. Dalam prinsip ABCD, kemampuan masyarakat untuk menemukan aset, kekuatan, dan potensi yang mereka miliki dipandang mampu menggerakkan dan memotivasi mereka untuk melakukan perubahan sekaligus menjadi pelaku utama perubahan tersebut.²⁰

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang aset zakat yang berpotensi dimanfaatkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Di samping mendapatkan informasi tentang aset zakat, juga ingin mendapatkan

²⁰ Salahudin et al., *Panduan KKN ABCD*.

gambaran tentang para *muzakki* yang menyerahkan zakat untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi. Teknik yang sering digunakan dalam ABCD ini antara lain : *Appreciative Inquiry*, yaitu upaya pengembangan diri melalui pengoptimalan berbagai potensi yang ada. Teknik lain adalah *Community Map* yaitu visualisasi pengetahuan dan persepsi berbasis masyarakat untuk mendorong pertukaran informasi dan menyetarakan kesempatan bagi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka; dan *Individual Asset*.

Alat yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan individual asset antara lain kuisisioner, interview dan *focus group discussion*. Manfaat dari Pemetaan Individual Aset antara lain: Membantu membangun landasan untuk memberdayakan masyarakat dan untuk saling ketergantungan dalam masyarakat, Membantu membangun hubungan dengan masyarakat, Membantu warga mengidentifikasi keterampilan dan bakat mereka sendiri Selain teknik yang ditawarkan dalam ABCD, juga digunakan *Indepth Interview* khususnya dengan para komisaris Baitul Mal yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota Komisaris.

F. Penelitian dan Analisis

Bentuk Intervensi Pemberdayaan Masyarakat

Mengingat pentingnya proses pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh, maka Pemerintah berinisiasi membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan ketidakberdayaan masyarakat di Kota Banda Aceh. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Kota yang kehadirannya didasarkan pada Qanun Provinsi Aceh nomor 10 tahun 2018. Baitul mal diberikan kewenangan untuk mengelola harta agama dari berbagai sumber termasuk pengelolaan zakat untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Fenomena menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu di Banda Aceh merupakan sebuah keharusan sehingga membutuhkan dukungan dan sentuhan banyak pihak. Meskipun Baitul Mal telah memiliki kewenangan untuk menangani persoalan kemiskinan, namun bila tidak didukung oleh elemen sosial lainnya, maka lembaga ini tidak bisa berbuat banyak.

Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa di antara bentuk pemberdayaan masyarakat miskin adalah menggiatkan zakat produktif. Untuk menggerakkan program ini diperlukan orang-orang yang optimis dengan etos kerja tinggi dan mampu memformulasikan berbagai bentuk dan strategi pemberdayaan. Ia menyadari bahwa merubah para *mustahik* menjadi *muzakki* tidak semudah berbicara. Menawarkan gagasan untuk penguatan masyarakat itu penting, namun yang jauh lebih penting adalah kemampuan praktis yang dimiliki pekerja sangat menentukan

sukses tidaknya program pemberdayaan ini. Kekurangan tenaga profesional ditambah lagi dengan persoalan pandemi Covid-19 yang belum berakhir membuat Baitul Mal mengalami kendala serius dalam menjalankan program pemberdayaan ini. Meskipun demikian kami tidak berniat berhenti untuk memikirkan solusi atas persoalan kemiskinan masyarakat.²¹

Berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat terus dikreasikan melalui terobosan-terobosan yang dinilai memiliki muatan strategis, efektif dan sinergis terus diusahakan sebagaimana disebutkan oleh Kepala Bidang informasi Baitul Mal Kota Banda Aceh. Menurutnya, beberapa terobosan yang sedang dilakukan Baitul Mal Kota secara periodik adalah menyiapkan *software* seperti web dan zakat online. Pemanfaatan media ini telah memberikan berbagai kemudahan bagi *muzaki* dalam menyalurkan kewajibannya. Masih dalam upaya mempermudah semua pihak, Baitul Mal telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka menyediakan fasilitas ATM Beras bagi masyarakat miskin.²²

Bentuk pemberdayaan lain yang diinisiasi Baitul mal adalah dengan melakukan pelatihan (*life skill*) bagi masyarakat kurang mampu melalui program kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh. Kerjasama ini bertujuan membina kemandirian ekonomi *Mustabik*.²³ Hal senada juga disebutkan oleh anggota Komisaris lainnya bahwa pelatihan *Life Skill* ini mencakup kursus menjahit, Service AC, teknik kelistrikan dan otomotif/ perbengkelan.²⁴ Terkait pernyataan ini Kepala Baitul Mal sendiri menyatakan, peserta pelatihan program *Life Skill* ini direkrut langsung melalui pimpinan *Gampong*- dalam wilayah Kota Banda Aceh.²⁵ Asqalani menjelaskan, selain melatih skil, Baitul Mal telah pernah menyalurkan bantuan becak untuk membantu perekonomian mereka. Bantuan tersebut memang mengalami kendala besar karena para penerima bantuan umumnya tidak fair. Maksudnya, saat dilakukan evaluasi ternyata kebanyakan penerima bantuan mengakui telah menjual becak yang diberikan Baitul Maldengan alasan yang beranekaragam.²⁶

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Asqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, tanggal 7 September 2021.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Muslim, Kasi informasi pada Baitul Mal Banda Aceh, 7 September 2021.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Dharma, Anggota Komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh, tangal 7 September 2021.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Munir dan Ibu Aisyah M.Ali, Anggota Komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh, tanggal 7 September 2021.

²⁵ Wawancara dengan Ketua Baitul Mal, Asqalai, 7 September 2021.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Asqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, 7 September 2021.

Selain Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat juga Baitul Mal Gampong yang dijadikan lokasi pengumpulan data, yaitu Baitul Mal Gampong Beurawe. Tgk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe, mengakui bahwa ia sedang menginventarisir aset zakat yang ada di Gampong untuk dikembangkan bagi kepentingan dan penguata ekonomi kaum miskin di kampungnya.²⁷ Ia mengakui terdapat sejumlah aset produktif seperti tanah waqaf milik Gampong yang dinilai memiliki nilai strategis dan potensial bagi penguatan zakat produktif. Namun Tgk Adnan baru saja memangku jabatan ini sehingga pengelolaan aset zakat baru memasuki fase permulaan.²⁸

Program yang sedang dikembangkan saat ini masih bersifat meneruskan program pimpinan lama yang lebih terfokus pada penguatan zakat konsumtif. Pemberian zakat konsumtif ini bersumber dari hasil aset gampong, dan zakat individu dari gampong Beurawe dan zakat para pengusaha di kawasan Beurawe dan sekitarnya.²⁹ Komunikasi personal yang dilakukan Adnan telah memberikan efek positif bagi pengembangan Baitul Mal gampong. Dalam penjelasannya ia menyebutkan dalam masa 1 (satu) tahun terakhir terjadi peningkatan zakat yang cukup menggembirakan. Secara angka ia mengakui bahwa zakat yang terkumpul selama ini berkisar antara Rp.25.000.000 sampai Rp.30.000.000/ tahun.

Angka ini mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan karena jumlah zakat dalam tahun ini (2020) telah mencapai Rp.200.000.000 (dua ratus juta). Jumlah ini belum termasuk zakat yang bersumber dari aset tanah waqaf gampong. Meskipun masih berorientasi konsumtif, namun ia telah memberanikan diri untuk menyiapkan beasiswa bagi anak-anak yatim miskin. Menurutnya, terdapat 10 (sepuluh) orang anak yatim – miskin yang mendapatkan beasiswa ini dengan jumlah Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu)/ bulan. Sedangkan 20 (dua puluh) orang anak lainnya juga disantuni secara insidental (non rutin) dengan menggunakan dana infaq dan sadaqah (bukan dana zakat) dengan jumlah yang bervariasi.³⁰

Selain Adnan Ali, informasi di sekitar pengelolaan zakat di Baitul Mal Beurawe juga disebutkan oleh Ibnu Sa'dan. Menurutnya, pengelolaan Baitul Mal Gampong Beurawe ini masih menganut asas ketokohan. Artinya ketenaran pribadi Tgk Adnan menjadi modal dalam mengumpulkan zakat di Beurawe. Ibnu Sa'dan menambahkan bahwa secara organisatoris, operasional pelaksanaan kegiatan Baitul Mal belum

²⁷ Hasil Wawancara dengan Tgk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 8 September 2021.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Tgk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 8 September 2021.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 8 September 2021.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Tgk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 8 September 2021.

menganut sistem manajemen modern karena hanya Ketua saja yang tampak aktif dan agresif, sedangkan pengurus lainnya masih kelihatan pasif dalam memainkan perannya. Namun ia mengakui bahwa baginya yang penting program itu bisa berjalan dengan baik, meskipun bila ditilik secara manajemen modern bentuk kepemimpinan ini cenderung tidak efektif.³¹

Selain Ibnu Sa'dan terdapat informan lain di luar gampong Beurawe yang ikut menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Beurawe yaitu Bapak M.Daud Jepara. Menurutnya, ada 2 (dua) alasan yang mendorong dirinya berzakat di Baitul Mal Beurawe, *pertama* karena ia membuka bisnisnya di gampong Beurawe, dan *kedua* karena melihat sosok Tgk Adnan sebagai pribadi yang jujur dan amanah.³²

Analisis dan Temuan

Data di atas menggambarkan adanya sejumlah intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Baitul Mal. Di antara intervensi itu adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah *stakeholder*, seperti perbankan, Balai Latihan Kerja, dan lain-lain. Kerjasama ini tentu memiliki keterkaitan dengan teori intervensi dan bentuk pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan Baitul Mal. Keterkaitan tersebut nampak dari bangunan kerjasama berbentuk *kolaboratif*, yaitu sejenis kerjasama dengan menggerakkan semua stakeholder dalam rangka memperkuat proses penguatan ekonomi masyarakat miskin. Karena itu pemodelan kerjasama berbentuk kolaboratif ini dapat menjadi pola yang cukup strategis dalam membangun proses pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kota Banda Aceh.

Berbeda dengan bentuk pemberdayaan yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Baitul Mal Gampong Beurawe juga memperlihatkan adanya bentuk pemberdayaan yang berbeda. Berdasarkan analisis terhadap data di atas menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 1 tahun terakhir ini, terlihat adanya kedekatan hubungan emosional antara ketua BMG dengan para *muzakki*. Kepribadian Tgk Adnan Ali yang dinilai jujur dan sederhana menjadi alasan utama para pengusaha di Beurawe dan sekitarnya untuk menyalurkan kewajiban zakatnya melalui Baitul Mal Beurawe. Faktor ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya angka pendapatan zakat di Beurawe. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa *Uswatu al-Fardiyah* (أسوة الفردية) atau keteladanan individual mampu menjadi salah satu bentuk dan model menarik dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Banda Aceh.

³¹ Hasil wawancara dengan Tgk Ibnu Sa'dan, Muzakki, Gampong Beurawe, 1 Oktober 2021.

³² Hasil wawancara dengan Bapak M.Daud Jepara, Muzakki dari gampong Lambhuk, tanggal 1 oktober 2021.

G. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat manapun di dunia ini. Fenomena ini tidak mudah diatasi, bahkan telah terbangun stigma bahwa kemiskinan itu tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan manusia. Namun upaya untuk menekan angka kemiskinan masih bisa dilakukan melalui berbagai upaya. Di antara upaya yang dilakukan dalam Islam adalah membangun Baitul Mal, yaitu sebuah lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Karena itu Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin menuju kemandirian melalui prinsip kebersahaan, sistemik, holistik dan regeneratif. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat itu dilakukan dengan membangun kerjasama dengan para pihak (*Stakeholder*) dengan harapan akan membuka jalan bagi upaya penguatan kemandirian masyarakat. Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan dalam rangka membangun pemberdayaan masyarakat adalah di antaranya adalah kerjasama berbentuk kolaboratif yaitu dengan menggerakkan berbagai potensi di luar Baitul Mal untuk ikut berpartisipasi membangun keberdayaan masyarakat miskin. Selain itu pola/bentuk keteladanan (*uswah*) juga dipraktikkan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan muzakki terhadap baitu mal.

Referensi

- Debrina Vita Ferezagia, 2018, “Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan,” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , Balai Pustaka, Jakarta.
- Edi Suharto, 2006, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Reika Aditama, Bandung.
- Elly M Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, hlm.792.
- Irfan Beik, “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika,” *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009): 45–53.

- Loewenberg, Frank.M, 1972, *Social Work, Social Welfare and Social intervention*. In Loewenberg, Frank.M, Ralph Dolgoff, *The Practice of Social Interventions : Goals, Roles and Strategies*, Itaca, FE. Peacock Publisher Inc.
- Mayo, M. 1998, *Social Work : Theme, Issues and Critical Debates*, Mac. Millan, London.
- Rahmat Arfan et al., 2020, “Peran Ukm Dalam Menstabilkan Harga Masker Sebagai Bentuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Banda Aceh,” *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi Dan Aplikasi)* 1, no. 1: 31.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru keempat, Rajawali press, Jakarta.
- T.M.Hasbi As-Shiddieqy, 1991, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta..
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid-3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Darul Fikri dan Gema Insani, Jakarta.